

Penguatan Tata Kelola Desa Digital Melalui Sosialisasi Desa.Id Bagi Perangkat Desa Kubangdeleg

Muhammad Irvan¹, Rafi Ilham Azhary², Dinda Dwi Destarini³, Iskandar Zulkarnaen⁴

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

email: irvanm@gmail.com¹, rafiilham12@gmail.com², dindadwid0912@gmail.com³,
iskandarzulkarnaen@ugj.ac.id⁴

Abstract

Digital transformation in villages is important for improving the accountability and transparency of public services. Kubangdeleg Village, which does not yet have an official .desa.id channel, needs intervention to build better digital governance. This community service program aims to introduce and implement digital channel socialization by providing workshops to village officials. During the three-hour session, 21 village officials were involved in understanding the importance of .desa.id, developing an information architecture with five core menus, and preparing initial content for the village channel. In addition, readiness was measured using the Digital Village Readiness Index (IKDD), which resulted in a score of 15/16, indicating the village's readiness to activate an official channel. The "3-1-5" model that was implemented proved to be effective, with results that included the appointment of administrators, the development of menu structures, and the preparation of initial content. These results are important as a basis for other villages to begin their digital transformation with limited resources. In conclusion, the success of the program confirms that organizational readiness is more important than technical readiness in the early stages of village digitalization. The implications of this study suggest that the "3-1-5" model can be replicated in other villages with similar conditions to accelerate the adoption of .desa.id channels and strengthen the integration of e-government at the grassroots level.

Keywords: Digital Village, .desa.id, E-Government, Digital Village Readiness Index, Socialization, Governance

Abstrak

Transformasi digital di desa menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan publik. Desa Kubangdeleg, yang belum memiliki kanal resmi .desa.id, membutuhkan intervensi untuk membangun tata kelola digital yang lebih baik. Program pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan sosialisasi mengenai kanal digital dengan memberikan workshop kepada perangkat desa. Dalam tiga jam sesi, 21 perangkat desa dilibatkan untuk memahami pentingnya .desa.id, menyusun arsitektur informasi dengan lima menu inti, dan menyiapkan konten perdana untuk kanal desa. Selain itu, pengukuran kesiapan dilakukan dengan menggunakan Indeks Kesiapan Desa Digital (IKDD), yang menghasilkan skor 15/16 yang menunjukkan kesiapan desa untuk mengaktifkan kanal resmi. Model "3-1-5" yang diterapkan terbukti efektif, dengan hasil yang mencakup penetapan admin, penyusunan struktur menu, dan penyusunan konten awal. Hasil ini penting sebagai dasar bagi desa lain dalam memulai transformasi digital dengan sumber daya yang terbatas. Kesimpulannya, keberhasilan program menegaskan bahwa kesiapan organisasi lebih penting dibanding kesiapan teknis pada tahap awal digitalisasi desa. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa model "3-1-5" dapat direplikasi pada desa lain dengan kondisi serupa untuk mempercepat adopsi kanal .desa.id dan memperkuat integrasi e-government di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Desa Digital, .desa.id, E-Government, Indeks Kesiapan Desa Digital, Sosialisasi, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Transformasi layanan publik di tingkat desa menuntut kanal informasi yang resmi, terstandar, dan mudah diakses (Adinegoro, 2023; Doramia Lumbanraja, 2020; Mahmud & Tesniwati, 2023; Mokobombang et al., 2023; Poernamawatie et al., 2023). Tanpa kanal yang jelas, informasi mengenai profil, layanan administrasi, regulasi, hingga kegiatan desa kerap tersebar di berbagai grup pesan, poster, dan akun media sosial yang tidak seragam (Budi et al., 2020; Muda et al., 2017). Kondisi ini menimbulkan fragmentasi informasi, menyulitkan warga mencari rujukan terpercaya, serta melemahkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa (Sambodo et al., 2023).

Puspasari (2018) menekankan bahwa e-village government menjadi kunci untuk mencapai tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, terutama dalam konteks desentralisasi pemerintahan di negara berkembang. Lebih lanjut, Sihotang et al. (2023) menunjukkan bahwa adopsi sistem informasi desa di Indonesia masih menghadapi kendala signifikan, terutama terkait kesiapan organisasi dan kejelasan peran pengelola. Urgensi teoretis ini memperkuat kebutuhan akan intervensi sistematis yang berfokus pada pemberdayaan kapasitas lokal

Dalam ekosistem digital pemerintahan, domain .desa.id berfungsi sebagai identitas kelembagaan yang membedakan kanal resmi milik pemerintah desa dari kanal komunitas/pribadi. Kanal resmi memudahkan penataan arsitektur informasi (profil, layanan, regulasi, berita/kegiatan, kontak), menjaga keterbaruan data, dan menjadi single source of truth bagi warga maupun mitra. Selain itu, keberadaan laman resmi menjadi prasyarat dasar untuk mengintegrasikan fitur pelayanan, publikasi anggaran/kinerja, serta promosi potensi lokal secara berkelanjutan.

Desa Kubangdeleg hingga awal program KKN belum memiliki website .desa.id. Informasi publik masih disebarakan melalui media yang beragam sehingga sulit ditelusuri kembali, sementara kebutuhan akan identitas digital meningkat baik untuk urusan layanan administrasi, transparansi program, maupun dukungan pada upaya branding desa wisata. Ketiadaan kanal resmi juga menyulitkan pembagian peran pengelola konten; belum ada admin yang ditetapkan, struktur halaman yang disepakati, maupun prosedur editorial sederhana untuk memastikan kesinambungan pembaruan (Bernot, A., et al., 2024).

Berangkat dari persoalan tersebut, pengabdian ini memposisikan pemberdayaan perangkat desa sebagai kunci. Alih-alih langsung menekankan aspek teknis pembuatan situs, program dirancang untuk menyiapkan tata kelola: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana struktur konten minimum dibangun, serta apa saja konten perdana yang harus tersedia saat kanal resmi diluncurkan. Pendekatan ini diharapkan menjadi pijakan praktis yang realistis dalam keterbatasan waktu dan sumber daya, serta mampu meminimalkan risiko disinformasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi publik desa.

Desa Kubangdeleg dipilih sebagai lokasi pengabdian dengan durasi program selama 35 hari. Pada saat kegiatan dimulai, desa ini belum memiliki kanal resmi berbasis

.desa.id, sehingga informasi publik seperti profil, layanan administrasi, regulasi, maupun agenda desa masih tersebar melalui media yang beragam dan tidak seragam. Kondisi ini membuat warga kesulitan merujuk pada satu sumber kredibel, sekaligus meningkatkan potensi terjadinya duplikasi informasi atau bahkan disinformasi.

Khalayak utama dari kegiatan ini adalah perangkat desa sebagai pengelola informasi publik (Mukhalalati & Taylor, 2019). Intervensi dilaksanakan melalui workshop sosialisasi pada tanggal 10 dengan durasi tiga jam, dihadiri oleh 21 peserta. Format kegiatan berupa paparan singkat yang diselingi dengan sesi tanya jawab, sehingga memungkinkan adanya diskusi terbuka dan penyamaan persepsi. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi di kalangan peserta mendorong pendekatan yang lebih sederhana, yakni penekanan pada aspek tata kelola, bukan pada teknis pembuatan situs (M. Baeuo et al., 2016).

Bertolak dari kondisi awal Desa Kubangdeleg yang belum memiliki kanal resmi .desa.id, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan pokok bagaimana intervensi singkat berbasis sosialisasi dapat meningkatkan kesiapan tata kelola informasi publik di tingkat desa; sejauh mana model operasional “3–1–5” tiga jam workshop, satu keputusan penetapan admin (utama–cadangan), dan lima menu inti mampu menghasilkan keputusan kunci dalam satu pertemuan; serta bagaimana Indeks Kesiapan Desa Digital (IKDD) dapat digunakan untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan tingkat kesiapan desa pasca-workshop secara ringkas namun akuntabel.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberdayakan perangkat desa agar siap mengelola kanal resmi .desa.id melalui penguatan tata kelola yang praktis. Secara khusus, kegiatan menargetkan tercapainya empat keluaran: penetapan admin (utama dan cadangan) sebagai pemegang mandat pengelolaan; kesepakatan arsitektur informasi minimum berupa lima menu inti (Profil, Layanan, Regulasi, Berita/Kegiatan, Kontak); penyusunan konten perdana yang siap unggah sebagai pengisi laman awal; serta perumusan preferensi domain sebagai dasar langkah administratif pendaftaran. Selain menghasilkan keluaran operasional, kegiatan juga dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan desa menggunakan IKDD sehingga pemerintah desa memiliki pijakan objektif dalam melanjutkan proses aktivasi kanal resmi setelah program berakhir.

Secara umum, kondisi awal menunjukkan bahwa desa belum memiliki admin resmi yang ditunjuk, belum ada arsitektur halaman yang disepakati, serta tidak tersedia alur editorial sederhana untuk memastikan keberlanjutan pembaruan informasi. Data dasar desa sebenarnya tersedia, tetapi masih terpisah di masing-masing unit kerja sehingga belum siap digunakan sebagai konten awal. Di sisi lain, terdapat potensi besar yang bisa dimanfaatkan, terutama karena desa tengah mendorong branding wisata melalui Taman Pawana dan telah memulai publikasi artikel di media daring. Momentum ini menjadi alasan penting untuk menyiapkan kanal resmi .desa.id sebagai wajah digital desa sekaligus penghubung antara layanan publik dan promosi potensi lokal.

METODE PENELITIAN

Pengabdian ini menggunakan desain partisipatif edukatif berbasis workshop

sosialisasi mengenai tata kelola Desa Digital. Format kegiatan adalah paparan (talk-only) yang diselingi tanya jawab terarah untuk menyamakan persepsi dan menghasilkan keputusan operasional pada saat yang sama. Fokus intervensi diletakkan pada pemberdayaan perangkat desa melalui tiga komponen pemahaman standar kanal resmi .desa.id, perancangan arsitektur informasi minimal (lima menu inti), dan penetapan peran/SOP editorial (admin utama–cadangan, alur draf–review–unggah).

Kegiatan dilaksanakan di Desa Kubangdeleg dalam rentang KKN 35 hari. Sesi inti (workshop sosialisasi) berlangsung pada tanggal 10 selama ± 3 jam sebagai satu rangkaian utuh (pembukaan, materi inti, diskusi, perumusan keputusan).

Khalayak adalah perangkat desa dan unsur pendukung pengelolaan informasi publik, dengan jumlah peserta 21 orang. Kriteria inklusi berperan/ditugaskan pada layanan, administrasi, atau komunikasi publik desa, hadir penuh selama sesi memperoleh mandat dari pemerintah desa untuk mengikuti sosialisasi dan berpartisipasi dalam perumusan keputusan. Kriteria eksklusi: tidak ditetapkan khusus; peserta yang tidak memenuhi kehadiran penuh dicatat tetapi tidak diikuti dalam pengambilan keputusan operasional.

Intervensi berupa sesi sosialisasi Desa Digital yang dirancang untuk menghasilkan keputusan operasional dalam satu pertemuan. Alur sesi (total ± 180 menit):

- a. Pembukaan & konteks ($\pm 15'$): tujuan, ekspektasi keluaran, dan gambaran kondisi awal desa.
- b. Materi inti ($\pm 75'$):
 - 1) Urgensi kanal resmi .desa.id dan implikasi tata kelola;
 - 2) Penyusunan arsitektur informasi minimal lima menu inti: Profil Desa, Layanan, Regulasi, Berita/Kegiatan, Kontak;
 - 3) Peran & SOP editorial: admin utama–cadangan; alur draf $\rightarrow$ review $\rightarrow$ unggah; standar minimal konten (1 paragraf, 1 foto, kontak valid).
- c. Tanya jawab terarah ($\pm 60'$): mengurai hambatan praktis (peran, data awal, foto, kewenangan pengesahan).
- d. Perumusan keputusan ($\pm 25'$): penetapan admin, finalisasi struktur menu, penyusunan daftar konten perdana, dan pencatatan preferensi domain.
- e. Penutup ($\pm 5'$): merangkum keputusan dan langkah pertama pasca-sesi.

Instrumen ini mencatat keputusan yang tercapai pada empat butir kunci: admin, struktur lima menu, konten perdana, dan preferensi domain. Setiap butir dinilai tercapai/tidak sebagai dasar skoring IKDD.

IKDD digunakan untuk menilai kesiapan pasca-workshop pada empat dimensi berikut, masing-masing berskala 0–4; skor total 0–16.

a. D1 – Peran (Admin):

0 = belum ada; 1 = calon belum disepakati; 2 = admin tunggal disebut; 3 = admin utama disepakati; 4 = admin utama & cadangan disepakati + tugas pokok ringkas.

b. D2 – Struktur (Arsitektur 5 Menu):

0 = belum ada; 1 = daftar acak; 2 = 3 menu disepakati; 3 = 4 menu disepakati; 4 = 5 menu final + urutan navigasi.

c. D3 – Konten Perdana:

0 = belum ada; 1 = daftar kasar; 2 = ≥ 2 item siap; 3 = ≥ 3 item siap; 4 = ≥ 4 item siap (teks singkat/foto/kontak tertera).

d. D4 – Langkah Administratif (.desa.id):

0 = tidak dibahas; 1 = wacana; 2 = preferensi domain dicatat; 3 = penanggung jawab pendaftaran ditetapkan; 4 = penanggung jawab + daftar dokumen pendukung (SK, surat) tercatat.

Kategori IKDD: rendah (0–5), sedang (6–10), siap-awal (11–13), siap-luncur (14–16).

Pra-sesi yaitu tim berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menetapkan waktu, daftar peserta, serta mengumpulkan bahan awal (profil singkat, kontak layanan, daftar regulasi yang tersedia). Moderator menyiapkan template arsitektur 5 menu dan lembar komitmen.

Pelaksanaan yaitu sesi dibuka dengan tujuan dan ekspektasi keluaran. Paparan inti mengenai .desa.id, arsitektur 5 menu, serta SOP editorial disampaikan, lalu dilanjutkan tanya jawab terarah guna mengurai hambatan praktis (penanggung jawab, ketersediaan data, kewenangan pengesahan). Di akhir, forum difasilitasi untuk mengisi lembar komitmen: penetapan admin utama–cadangan, finalisasi struktur 5 menu, penyusunan daftar konten perdana, dan pencatatan preferensi domain beserta penanggung jawab pendaftarannya.

Pasca-sesi yaitu tim merekap keputusan, mengalkulasi IKDD (empat dimensi), serta menyusun ringkasan “Langkah Pertama” yang diserahkan ke pemerintah desa (SK admin, pengumpulan konten perdana, pengajuan domain).

Analisis Bersifat Deskriptif

- Capaian proses: kehadiran (n=21), durasi (± 3 jam), dan dinamika tanya jawab (tema dominan).
- Capaian keluaran: status tiap butir pada lembar komitmen (tercapai/tidak).
- IKDD: skor per dimensi (0–4), total (0–16), dan kategori (rendah, sedang, siap-awal, siap-luncur).
- (Opsional) Jika digunakan kuesioner pra–pasca, dilaporkan persentase jawaban benar dan selisihnya; tanpa identitas individu.

Hasil disajikan dalam tabel (lembar komitmen & IKDD) dan narasi yang menautkan capaian keluaran dengan tujuan kegiatan.

Kegiatan merupakan sosialisasi non-intervensi tanpa pengumpulan data pribadi. Peserta mengikuti dengan persetujuan lisan dari pemerintah desa. Seluruh pelaporan menggunakan data agregat; tidak ada identitas individu yang dicantumkan. Akses dokumen internal (jika ada) hanya untuk verifikasi konten awal dan tidak dipublikasikan. Kegiatan dilaksanakan atas izin pemerintah desa dalam kerangka KKN.

Kriteria Keberhasilan

- Admin utama dan cadangan ditetapkan dalam forum;

- b. Arsitektur 5 menu (Profil, Layanan, Regulasi, Berita/Kegiatan, Kontak) disepakati;
- c. ≥ 4 item konten perdana (teks singkat/foto/kontak) siap unggah;
- d. Preferensi domain .desa.id dan penanggung jawab pendaftaran tercatat;
Skor IKDD ≥ 11 (kategori “siap-awal”) idealnya ≥ 14 (“siap-luncur”).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Proses Kegiatan

Sesi sosialisasi Desa Digital terselenggara sesuai rancangan pada tanggal 10 selama ± 3 jam dalam satu rangkaian utuh (pembukaan $\rightarrow$ paparan materi $\rightarrow$ tanya jawab $\rightarrow$ perumusan keputusan). Sebanyak 21 peserta dari unsur perangkat desa mengikuti kegiatan secara penuh. Pemilihan format talk-only dengan jeda tanya jawab terbukti tepat: paparan inti berjalan efektif tanpa hambatan teknis perangkat, sementara diskusi memungkinkan penyamaan persepsi lintas unit kerja dalam satu forum.

Dinamika diskusi terfokus pada empat tema kunci penetapan peran admin bagaimana membagi tugas antara admin utama dan cadangan serta siapa pemberi persetujuan akhir, arsitektur informasi lima menu penyamaan istilah dan urutan navigasi agar mudah dipahami warga, konten perdana inventarisasi bahan yang sudah tersedia (profil singkat, layanan dasar, kontak, agenda) serta standar minimal isi (1 paragraf + 1 foto + kontak valid) dan langkah administratif domain pemilihan preferensi nama .desa.id dan penanggung jawab pengajuan. Moderator menggunakan lembar komitmen untuk mengarahkan forum sehingga setiap tema berujung pada keputusan operasional, bukan sekadar wacana.

Kendala minor yang muncul terutama sebaran data awal yang masih berada di unit berbeda dan pertanyaan mengenai kewenangan pengesahan konten diatasi di tempat melalui penugasan sementara: unit pemilik data diminta menyalurkan bahan ke admin yang ditunjuk, sementara persetujuan konten diberlakukan alur singkat draf $\rightarrow$ review $\rightarrow$ unggah dengan pejabat yang disepakati. Sinkronisasi ini membuat sesi penutup dapat merangkum keluaran dalam bentuk keputusan yang terdokumentasi pada lembar komitmen.

Capaian Keluaran Operasional

Sesi menghasilkan keputusan-keputusan kunci yang diperlukan untuk memulai tata kelola Desa Digital. Forum menetapkan admin utama dan cadangan untuk pengelolaan kanal, menyepakati arsitektur informasi minimum berisi lima menu inti Profil Desa, Layanan, Regulasi, Berita/Kegiatan, dan Kontak beserta urutan navigasi dan batasan isi agar mudah dipahami warga. Di saat yang sama, forum menghimpun konten perdana yang siap unggah (teks singkat, 1 foto, dan kontak valid per halaman) serta menyepakati preferensi domain mengikuti pola <namadesa>.desa.id (dipilih: kubangdeleg.desa.id; alternatif disiapkan bila terjadi konflik nama). Untuk langkah administratif, penanggung jawab pendaftaran ditetapkan pada unsur sekretariat bersama admin, dengan daftar dokumen pengantar yang dirujuk ke ketentuan layanan domain pemerintah.

Tabel 1. Ringkasan keluaran operasional

Butir Keputusan	Status	Rincian singkat (disepakati di forum)
Penetapan peran	Tercapai	Admin utama & cadangan ditunjuk; alur editorial ringkas draf → review → unggah.
Arsitektur menu	5 Tercapai	Urutan navigasi: Profil Desa → Layanan → Regulasi → Berita/Kegiatan → Kontak.
Konten perdana	Tercapai	≥4 item siap unggah: (1) Profil singkat desa; (2) Layanan administrasi paling dicari (mis. surat keterangan/domisili daftar & alur); (3) Regulasi ringkas (Perdes/Surat Edaran terbaru); (4) Berita/Kegiatan (ringkasan kegiatan desa terkini); (5) Kontak kantor desa (alamat, jam layanan, nomor WA).
Standar isi minimum	Tercapai	Tiap halaman: 1 paragraf ringkas, 1 foto pendukung, kontak valid; gaya bahasa informatif.
Preferensi domain	Tercapai	kubangdeleg. <i>.desa.id</i> (alternatif disiapkan bila konflik).
Penanggung jawab pendaftaran	Tercapai	Sekretariat desa bersama admin; menyiapkan berkas pengantar sesuai layanan domain pemerintah.

Sumber: Data diolah

Indeks Kesiapan Desa Digital (IKDD)

Penilaian kesiapan pasca-sesi menggunakan IKDD pada empat dimensi (0–4 per dimensi; total 0–16). Berdasarkan keputusan forum (Bagian 3.2), diperoleh skor berikut:

Tabel 2. Indeks Kesiapan Desa Digital

Dimensi	Deskripsi Ringkas	Skor (0–4)	Alasan Penetapan
D1 – Peran (Admin)	Penetapan admin utama & cadangan, tugas pokok ringkas	4	Admin utama & cadangan disepakati, alur kerja draf → review → unggah dirumuskan.
D2 – Struktur (Arsitektur Menu)	Profil, Layanan, Regulasi, Berita/Kegiatan, Kontak	4	5 menu final disepakati berikut urutan navigasi.

Dimensi	Deskripsi Ringkas	Skor (0–4)	Alasan Penetapan
D3 – Konten Perdana	Item konten awal yang siap unggah	4	≥4 item (profil, layanan inti, regulasi ringkas, berita/kegiatan, kontak) siap dengan ringkasan & penanggung jawab isi.
D4 – Langkah Administratif (.desa.id)	Preferensi domain & penanggung jawab pendaftaran	3	Preferensi domain dicatat dan penanggung jawab pendaftaran ditetapkan; daftar dokumen pendukung akan dilengkapi setelah sesi.
Total IKDD = 4 + 4 + 4 + 3 = 15 → Kategori: “siap-luncur” (14–16).			
Sumber: Data diolah			

Skor menunjukkan desa sangat siap untuk aktivasi kanal resmi: peran jelas, struktur minimal terpenuhi, dan konten awal tersedia. Satu-satunya celah kecil berada pada administrasi domain dokumen pendukung (mis. SK, surat pengantar, email kerja) perlu dirapikan agar pengajuan .desa.id segera dieksekusi. Setelah kelengkapan administratif dipenuhi, kondisi beralih ke operasional penuh dengan fokus berikutnya pada ritme kurasi konten bulanan.

Peningkatan Pengetahuan Pra–Pasca

Format workshop yang talk-only ±3 jam tidak menggunakan kuesioner tertulis formal karena keterbatasan waktu. Sebagai gantinya, fasilitator melakukan cek pemahaman spontan (quick check) berbasis angkat tangan pada 5 butir kunci sebelum dan sesudah paparan. Hasil ini bersifat indikatif untuk menangkap efek langsung sesi bukan pengukuran akademik penuh namun cukup memberi sinyal perubahan pemahaman kerja.

Tabel 3. Peningkatan Pengetahuan Pra-Pasca

Butir Pemahaman	Cek Ringkasan Topik	% Benar Pra	% Benar Pasca
1	Fungsi & pentingnya kanal resmi .desa.id	76%	100%
2	Lima menu inti (Profil, Layanan, Regulasi, Berita/Kegiatan, Kontak)	48%	90%
3	Peran admin (utama–cadangan) & kewenangan persetujuan	38%	95%
4	Alur editorial: draf → review → unggah	24%	86%

5	Langkah administratif domain (preferensi nama & penanggung jawab)	19%	81%
---	---	-----	-----

Rata-rata (5 butir): Pra 41% → Pasca 90% ($\Delta +49$ poin persentase).

Sumber: Data diolah

Interpretasi. Lonjakan terbesar muncul pada butir alur editorial dan langkah administratif domain topik yang sebelumnya paling jarang dipahami karena tidak terdokumentasi sebagai prosedur kerja. Kenaikan “fungsi . .desa.id” mencapai 100% pasca-sesi, mencerminkan keberhasilan penyamaan persepsi. Walau bersifat cepat dan non-formal, pola ini konsisten dengan capaian keluaran operasional (Bagian 3.2) dan skor IKDD “siap-luncur” (Bagian 3.3), sehingga memperkuat kesimpulan bahwa model 3–1–5 efektif menyentuh aspek pengetahuan dan keputusan kerja secara serentak.

Temuan Kualitatif Pendukung

Diskusi menghasilkan sejumlah temuan kualitatif yang menjelaskan mengapa keputusan bisa dicapai cepat. Pertama, peserta menilai pemetaan lima menu inti sebagai “paling masuk akal untuk mulai,” karena langsung menjawab pertanyaan warga sehari-hari (profil, layanan, regulasi) dan menyediakan etalase kegiatan desa (berita/kegiatan) serta saluran umpan balik (kontak). Kedua, sebagian peserta awalnya ragu soal kewenangan pengesahan konten; keraguan ini hilang setelah forum menyetujui alur editorial ringkas draf → review → unggah dengan pejabat yang ditunjuk, sehingga ambiguitas peran terselesaikan. Ketiga, hambatan sebaran data (profil, layanan, kontak) di unit berbeda diatasi dengan penugasan sementara: masing-masing unit mengirim draf 1 paragraf + 1 foto kepada admin dalam 7 hari kerja. Keempat, terkait administrasi domain, forum menerima bahwa preferensi nama dan penanggung jawab pengajuan cukup diputuskan di sesi; pengumpulan dokumen pendukung dilakukan setelahnya sesuai jalur layanan pemerintah. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa mekanisme komitmen tertulis (commitment sheet) berperan sebagai boundary object menyatukan persepsi lintas unit ke keluaran operasional yang konkret (Dada, 2006).

Pembahasan

Efektivitas model “3–1–5”. Hasil menunjukkan bahwa tiga jam sesi terstruktur cukup untuk memindahkan forum dari orientasi ke keputusan operasional: satu keputusan kunci (admin utama–cadangan) dan lima keputusan struktur (menu inti) tercapai, disertai daftar konten perdana dan preferensi domain. Ini menegaskan bahwa pada desa yang belum memiliki kanal, tata kelola bukan teknis adalah pengungkit utama kesiapan awal. Penetapan admin menutup celah akuntabilitas, sementara arsitektur lima menu menyediakan minimum viable IA agar situs dapat diluncurkan tanpa menunggu konten sempurna.

Tata kelola lebih menentukan daripada teknis. Keputusan mengenai peran, struktur, dan SOP editorial langsung mengurangi ketidakpastian kerja dan menstandarkan proses pembaruan. Dalam konteks sumber daya terbatas, standar isi minimum (1 paragraf,

1 foto, kontak valid) memberi kerangka kualitas yang realistis sekaligus mencegah halaman kosong. Keluaran ini tercermin dalam IKDD = 15 (siap-luncur) tinggi di tiga dimensi (peran, struktur, konten) dan tinggal melengkapi administrasi domain untuk eksekusi.

Lebih lanjut, Sabani et al. (2023) menunjukkan bahwa faktor organisasional seperti role clarity dan prosedur kerja yang jelas menjadi prediktor lebih kuat terhadap adopsi e-government berkelanjutan dibandingkan ketersediaan teknologi semata. Dalam konteks desa, di mana kapasitas teknis terbatas, penguatan tata kelola melalui penetapan peran dan struktur konten menjadi strategi yang lebih efektif dan realistis untuk memulai transformasi digital.

Temuan konsisten dengan kajian e-readiness yang menempatkan kesiapan organisasi (role clarity, prosedur, konten) sebagai penentu adopsi berkelanjutan pada lembaga pemerintah kecil; serta dengan prinsip arsitektur informasi layanan publik yang mengutamakan navigasi sederhana dan findability untuk menumbuhkan kepercayaan. Dari sisi andragogi, format talk-only + Q&A yang relevan tugas terbukti memadai memicu perubahan praktik, tercermin pada lonjakan pemahaman cepat (3.4) dan keberanian mengambil keputusan kunci (3.2).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan dipacu oleh forum lintas unit yang memiliki mandat, penggunaan commitment sheet untuk menutup setiap isu dengan keputusan tertulis, dan contoh konten konkret yang menekan analysis paralysis. Hambatan utama adalah sebaran data dan administrasi domain; keduanya bersifat pasca-sesi dan dapat diselesaikan melalui penugasan dan daftar dokumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program pemberdayaan perangkat desa melalui sosialisasi Desa Digital yang berfokus pada tata kelola bukan teknis berhasil menaikkan kesiapan organisasi Desa Kubangdeleg untuk mengaktifkan kanal resmi .desa.id. Dalam tiga jam sesi terstruktur, forum menghasilkan keluaran operasional yang lengkap: penunjukan admin utama–cadangan, arsitektur informasi lima menu (Profil, Layanan, Regulasi, Berita/Kegiatan, Kontak), daftar konten perdana yang siap unggah, serta preferensi nama domain beserta penanggung jawab pendaftarannya. Penilaian menggunakan Indeks Kesiapan Desa Digital (IKDD) memberi skor 15/16 (kategori “siap-luncur”), menandakan desa berada pada tahap siap eksekusi setelah melengkapi berkas administratif domain.

Implikasi praktisnya, model “3–1–5” 3 jam workshop, 1 keputusan admin, 5 menu inti efektif sebagai format percepatan bagi desa pemula. Langkah langsung yang direkomendasikan kepada pemerintah desa mengesahkan admin melalui SK, mengajukan domain .desa.id, dan mengunggah 4–5 konten perdana pada pekan pertama operasional. Untuk menjaga keberlanjutan, desa disarankan menetapkan SOP editorial ringkas (draft–review–unggah), kalender unggah bulanan, dan bank konten lintas unit kerja.

Keterbatasan kerja ini terletak pada absennya praktik teknis dan aktivasi domain dalam masa KKN, namun demikian, paket keputusan dan skor IKDD menunjukkan kesiapan yang memadai untuk dilanjutkan secara mandiri oleh pemerintah desa. Model ini dapat direplikasi pada desa lain dengan karakteristik awal serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis transformasi digital layanan publik pertanahan: Hak tanggungan elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1). <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135>
- Baeuo, M. O., Ab. Rahim, N. Z. B., & Alaraibi, A. A. M. (2016). Technology aspects of e-government readiness in developing countries: A review of the literature. *Computer and Information Science*, 9(4). <https://doi.org/10.5539/cis.v9n4p1>
- Bernot, A., & Prasetyo, A. (2024). Institutional dimensions in open government data: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Affairs*. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2377609>
- Budi, N. F. A., Fitriani, W. R., Hidayanto, A. N., Kurnia, S., & Inan, D. I. (2020). A study of government 2.0 implementation in Indonesia. *Socio-Economic Planning Sciences*, 72. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100920>
- Dada, D. (2006). E-readiness for developing countries: Moving the focus from the environment to the users. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 27(1). <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2006.tb00183.x>
- Dorania Lumbanraja, A. (2020). Urgensi transformasi pelayanan publik melalui e-government pada new normal dan reformasi regulasi birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Mahmud, M. F., & Tesniwati, R. (2023). Peningkatan kinerja melalui transformasi digital layanan publik kepabeanaan yang diperkuat dengan budaya dan pola kerja adaptif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(2). <https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i2.7004>
- Mokobombang, W., Syafaruddin, S., Syafaruddin, A. R. A., Khaeriyah, K., & Natsir, N. (2023). Dampak perubahan layanan publik yang disebabkan oleh teknologi dan media sosial. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(1). <https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i1.4180>
- Muda, I., Wardani, D. Y., Erlina, Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). The influence of human resources competency and the use of information technology on the quality of local government financial report with regional accounting system as an intervening. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(20).
- Mukhalalati, B. A., & Taylor, A. (2019). Adult learning theories in context: A quick guide for healthcare professional educators. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, 6. <https://doi.org/10.1177/2382120519840332>
- Poernamawatie, F., Kurniawan, P. A., Hermanto, S., Susipta, I. N., & Hertanto, R. H. (2023). Implementasi transformasi digital layanan keuangan mahasiswa pasca pandemi Covid-19 di Universitas Negeri Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3). <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1370>

- Puspasari, N. (2018). E-village government: For transparent and accountable village governance. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.21532/apfj.001.17.02.02.10>
- Sabani, A., Thai, V., & Hossain, M. A. (2023). Factors affecting citizen adoption of e-government in developing countries. *Journal of Global Information Management*, 31(1). <https://doi.org/10.4018/jgim.318131>
- Sambodo, M. T., Hidayat, S., Rahmayanti, A. Z., Handoyo, F. W., Yuliana, C. I., Hidayatina, A., Purwanto, P., Suryanto, J., Yaumidin, U. K., Nadjib, M., & Astuty, E. D. (2023). Towards a new approach to community-based rural development: Lesson learned from Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2267741>
- Sihotang, D. M., Purwandari, B., Eitiveni, I., Putri, M. F., & Hidayanto, A. N. (2023). Factors influencing village information systems adoption in Indonesia: A qualitative study. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 89(5). <https://doi.org/10.1002/isd2.12271>